LKPJ & LPPD

KECAMATAN PAGUYANGAN

2023

LKPJ

Laporan keterangan Pertanggungjawaban

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

KECAMATAN PAGUYANGAN

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276

Email : kec.paguyangan@gmail.com

Website : https://paguyangan.brebeskab.go.id/

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

A. CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH

1. Capaian Indikator Kinerja Tujuan Pemerintah Daerah

Capaian Indikator Kinerja Tujuan Kecamatan Paguyangan T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	**Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**	**Indeks**	83,47	100	83,51

Keterangan/Pembahasan Tabel :

a Penjelasan Indikator

- Maksud penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya
- Tujuan dari pelaksanaan IKM ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja / kualitas pelayanan di Kecamatan Paguyangan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha dan layanan yang lain sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan
- Jumlah responden IKM di Kecamatan Paguyangan sebanyak 60 orang
- Untuk sarana dan prasarana Kecamatan Paguyangan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui APBD
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 83,51 dan mutu pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK

b. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.

- Secara umum pelayanan Kecamatan Paguyangan kepada Masyarakat mengalami peningkatan hal ini ditunjukan dengan hasil survey naik dari tahun sebelumnya walaupun masih memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan

c. Analisis Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Masyarakat kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya dalam pengisian lembar kuisioner. Hal ini disebabkan oleh :

a. Kurangnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat.
b. Kurangnya kepercayaab Masyarakat terhadap Upaya perubahan paradigma Perangkat Daerah.

- Masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke bawah. Sehingga perlu adanya sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan pihak Desa didalam wadah Rakorcam membahas tentang sosialisai SOTK Perangkat Daerah.

Solusi

- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
- Perlunya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas ketrampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
- Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

2. Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

Capaian Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah
Kecamatan Paguyangan T.A 2023

NO	INDIKATOR	SATUAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1	**Hasil Survey Kepuasan Masyarakat Kecamatan Paguyangan**	**%**	83,47	100	83,51

Keterangan/Pembahasan Tabel :

a Penjelasan Indikator

- Maksud penyusunan laporan Survei Kepuasaan Masyarakat (SKM) dimaksudkan sebagai acuan bagi unit pelayanan instansi pemerintah untuk menyusun dan menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik selanjutnya
- Tujuan dari pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat ini adalah untuk mengukur tingkat kepuasaan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik, serta untuk mendapatkan umpan balik (feedback) secara berkala atas pencapaian kinerja / kualitas pelayanan di Kecamatan Paguyangan kepada masyarakat khususnya para pelaku usaha dan layanan yang lain sebagai bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik yang selanjutnya secara berkesinambungan

- Jumlah responden Survei Kepuasan Masyarakat di Kecamatan Paguyangan sebanyak 60 orang
- Untuk sarana dan prasarana Kecamatan Paguyangan selalu berusaha meningkatkan kualitas dan kuantitasnya dengan cara merencanakan penambahan sarana dan prasarana perbaikan pelayanan melalui APBD
- Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 83,51 dan mutu pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK

b. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.

- Secara umum pelayanan Kecamatan Paguyangan kepada Masyarakat mengalami peningkatan hal ini ditunjukan dengan hasil survey naik dari tahun sebelumnya walaupun masih memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan.

c. Analisis Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Masyarakat kurang respek/tidak bersungguh-sungguh dalam memberikan pendapatnya dalam pengisian lembar kuisioner. Hal ini disebabkan oleh :
  c. Kurangnya pemahaman Masyarakat akan pentingnya hasil Survei Indek Kepuasan Masyarakat.
  d. Kurangnya kepercayaab Masyarakat terhadap Upaya perubahan paradigma Perangkat Daerah.

- Masyarakat belum sepenuhnya paham dan mengetahui tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Hal ini disebabkan karena kurangnya sosialisasi ke bawah. Sehingga perlu adanya sosialisasi antara pihak Kecamatan dengan pihak Desa didalam wadah Rakorcam membahas tentang sosialisai SOTK Perangkat Daerah.

Solusi

- Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya Survei Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan guna mewujudkan pelayanan prima sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat.
- Perlunya konsistensi para penyelenggara pelayanan publik di semua sektor secara terus menerus dengan meningkatkan kemampuan, aktivitas ketrampilan, responsibilitas dan kelengkapan sarana prasarana pendukung dalam melaksanakan pelayanan publik secara transparan dan akuntabel.
- Perlunya peningkatan SDM aparatur melalui pelatihan dan diklat teknis tentang pelayanan publik dalam upaya mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

3. **Capaian Kinerja Program Pembangunan**

Capaian Indikator Kinerja Program Rencana Prioritas Kecamatan Paguyangan T.A 2023.

NO	BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN/ PROGRAM PRIORITAS PEMBANGUNAN/ INDIKATOR KINERJA PROGRAM	SAT UAN	KONDISI AWAL 2022	TARGET 2023	REALISASI 2023
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA *Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan*	%	83,47	96	83,51
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK *Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN*	%	83,47	100	83,51
3.	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN Persentase Desa yang Melaksanakan *Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik.*	%	85	100	87
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM *Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani*	%	90	100	92
5.	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM. *Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum.*	%	-	95	96
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA. *Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik*	%	85	100	87

Keterangan/Pembahasan Tabel :

a. Penjelasan Indikator

- PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA
  Indikator : Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan.

  Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 83,51 dan mutu pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK.
- PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
  Indikator : Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN.

  Hasil Survey Kepuasan Pelayanan PATEN. Indikator ini karena masih dalam lingkup pelayanan perkantoran Kecamatan sehingga menggunakan hasil Survey Indeks kepuasan Masyarakat (IKM).
- PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN
  Indikator : Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik. Persentase pelaksanaan administrasi desa dalam pengelolaan keuangan desa meningkat hal ini ditunjang oleh kinerja kecamatan yang

lebih aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi DD, ADD serta Bantuan keuangan serta pelapoanya.

- PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
  Indikator : Pesentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani. Kondisi kemananan dan ketertiban umum di Kecamatan Paguyangan aman dan kondusif karena seksi trantibum rutin mengadakan patrol wilayah, begitu juga saat terjadi bencana alam seperti banjir dan tanah longsor selalu siap dan sigap.
- PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.
  Indikator : Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum. Program kegiatan penyelenggaraan urusan pemeritahan umum secara umum di kantor Kecamatan Paguyangan berjalan lancar karena antar seksi saling berkoordinasi dan bersinergi dengan baik dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada Masyarakat.
- PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA.
  Administrasi Serta Pengelolaan Keuangan Desa Yang Tertib Dan Baik. Persentase pelaksanaan administrasi desa dalam pengelolaan keuangan desa di Kecamatan Paguyangan meningkat. Hal ini didikung oleh Program yang menjadi inovasi Kecamatan Paguyangan yaitu Klinik Konsultasi Pemerintahan Desa yang merupakan wadah konsultasi untuk Solusi pemerintahan desa yang lebih baik dan akuntabel terutama dalam pelaksanaan penyusunan administrasi desa.

b. Perbandingan Target dan Realisasi dengan Tahun Sebelumnya.

Secara umum program kegiatan pelayanan di Kecamatan Paguyangan kepada Masyarakat mengalami peningkatan hal ini ditunjukan dengan hasil nilai indicator masing-masing program yang naik dari tahun sebelumnya walaupun masih memiliki kekurangan dalam memberikan pelayanan.

c. Analisis Permasalahan dan Solusi

Permasalahan

- Penyediaan sarana dan prasarana yang masih kurang memadai.
- Masih kurangnya pemahaman pegawai dalam hal alur pelanan yang optimal.
- Masalah utama di kecamatan Paguyangan yang masih belum bisa terselesaikan yaitu masalah pelunasan PBB.

Solusi

- Memperbaharui fasilitas sarana dan prasarana secara terus menerus untuk meningkatkan pelayanan prima.
- Peningkatan kompetensi pegawai ditingkatkan dengan pelatihan, pelayanan prima dan pengetahuan tentang peraturan perizinan yang berlaku agar dapat menjelaskan setiap alur perizinan, sehingga dapat dimengerti pengguna jasa dengan lebih baik
- Melakukan koordinasi yang lebih intensif kepada desa dalam penarikan untuk pelunasn PBB melalui monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.

4.	**Program mencakup tujuan, manfaat dan dampak dan Kegiatan dan sub kegiatan meliputi keluaran / hasil dari pelaksanaan kegiatan**		
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
	a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah b. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	Keluaran Kegiatan	:	Tersusunya dokumen atau laporan perencanaan dan capaian kinerja
	Hasil Kegiatan	:	- Perencanaan menjadi lebih terarah dan terstruktur - Bisa menjadi bahan evaluasi kinerja sertelah mengetahui realisasi dari target yang ditetapkan
	b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
	Keluaran Kegiatan	:	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN
	Hasil Kegiatan	:	Dengan terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN akan meningkatkan produktifitas dan kompetensi karyawan/ ASN
	c. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
		:	b. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
		:	c. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
		:	d. Penyediaan Bahan Logistik kantor
		:	e. Penyediaan Bahan Cetakan dan Penggandaan
	Keluaran Kegiatan	:	Terpenuhinya belanja operasional kegiatan kantor
	Hasil Kegiatan	:	Kegiatan /tugas operasional dan pelayanan berjalan lancar dan optimal
	d. Kegiatan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
		:	b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
		:	c. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
	Keluaran Kegiatan	:	Terpenuhinya jasa penunjang urusan pemerintahan di Kecamatan Paguyangan
	Hasil Kegiatan	:	Kegiatan komunikasi, koordinasi, dan kegiatan penunjang urusan pemerintahan berjalan lebih maksimal.
	e. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		

	Sub Kegiatan	:	a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas atau Kendaraan dinas Jabatan
		:	b. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainya
	Keluaran Kegiatan	:	Terpenuhinya jasa pemeliharaan dan perawatan kendaraan dinas, perlatan dan mesin lainya
	Hasil Kegiatan	:	Aset SKPD menjadi terawat dan tahan lama karena terawat dengan baik
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
	a.Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		
	Sub Kegiatan	:	a. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait
	Keluaran Kegiatan	:	Tercapainya koordinasi/sinergi dengan Instansi lain
	Hasil Kegiatan	:	Dengan koordinasi yang baik informasi akan lebih maksimal sehinga pelayanan publik bisa berjalan lancar dan optimal
	b.Pelakasanaan Urusan Pemeintahan yang Dilimpahkan Kepada Camat		
	Sub Kegiatan	:	a. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha b. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan c. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan
	Keluaran Kegiatan	:	- Terpenuhinya kegiatan legislasi dokumen perizinan dan capil - Pembinaan administrasi Pemerintahan Desa dan Instensifikasi PBB - Monitoring ADD, Bankeu, DD dan BPNT
	Hasil Kegiatan	:	- Kegiatan pelayannan kepada masyarakat berjalan optimal - Administrasi Pemerintahan Desa menjadi lebih tertib dan tertata - Kegiatan pelaksanaan anggaran di Desa jadi lebih kondusif
3.	PROGRAM PEMPERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
	a.Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa		
	Sub Kegiatan	:	a. Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
	Keluaran Kegiatan	:	Kegiatan musrenbangcam dan monitoring musrenbangdes

	Hasil Kegiatan	:	Kegiatan musrenbagcam dan musrenbangdes berjalan lancar dengan hasil usulan prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan.
4.	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
	a.Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum		
	Sub Kegiatan	:	a. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan
	Keluaran Kegiatan	:	Patroli wilayah di Brebes Selatan khususnya Kecamatan paguyangan
	Hasil Kegiatan	:	- Tercipatnya ketentraman dan ketertiban umum di masyarakat - Tersedianya penjaga keamanan kantor sehingga kegiatan pelayanan di Kecamatan berjalan aman dan kondusif
5.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		
	a.Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa		
	Sub Kegiatan	:	a. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa
	Keluaran Kegiatan	:	Pembinaan administrasi desa dan kegiatan PKK
	Hasil Kegiatan	:	- Administrasi tingkat desa menjadi lebih tertib - Pemberdayaan perempuan untuk ikut serta pembagunan melalui program PKK Kecamatan.

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA		
Tujuan Program	:	- Tercapainya Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan Paguyangan - Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan Paguyangan - Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan Paguyangan - Tercapainya Administrasi Umum Perangkat Daerah di Kecamatan Paguyangan - Terlaksananya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan Paguyangan - Tercapainya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan paguyangan
Dampak Program	:	- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah di Kecamatan paguyangan terlaksana dengan baik. - Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah di Kecamatan paguyangan bisa berjalan sesuai rencana - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan paguyangan berjalan dengan baik. - Administrasi Umum Perangkat terkait kegiatan operasional kantor Kecamatan paguyangan berjalan dengan lancer - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terkait pelayanan umum di Kecamatan paguyangan berjalan dengan baik. - Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah di Kecamatan paguyangan bisa terlaksana dengan optimal.
Manfaat Program	:	- Penyusunan Dokumen Perencanaan, Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja di Kecamatan Paguyangan terlaksana dengan baik dan optimal - Pemenuhan hak karyawan berupa penyediaan gaji dan tunjangan berjalan dan tercapai secara optimal - Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah di Kecamatan paguyangan berjalan dengan baik. - Kegiatan Administrasi Umum Perangkat terkait kegiatan operasional kantor Kecamatan paguyangan berjalan dengan lancar dan optimal

		- Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah terkait pelayanan umum di Kecamatan paguyangan berjalan dengan lancar dan maksimal - Aset dan barang milik daerah di Kecamatan paguyangan terpelihara dan terawat dengan baik sehingga mendukung kegiatan pelayanan yang optimal di kantor Kecamatan Paguyangan
2. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		
Tujuan Program	:	- Terlaksananya Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan - Tercapainya Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat
Dampak Program	:	- Kegiatan Kordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintah di Tingkat Kecamatan berjalan dengan lancar - Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat berjalan optimal
Manfaat Program	:	- Meningkatkan Koordinasi/Sinergi Prencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait - Meningkatkan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat.
3. PROGRAM PEMPERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN		
Tujuan Program	:	- Tercapainya Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Dampak Program	:	- Meningkatkan Kordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa
Manfaat Program	:	- Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa
4. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		
Tujuan Program	:	- Terlaksananya Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Paguyangan
Dampak Program	:	- Meningkatkan Kordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Kecamatan Paguyangan
Manfaat Program	:	- Meningkatkan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan sehingga tercipta keamanan, ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan paguyangan
5. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		

Tujuan Program	:	- Terciptanya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Dampak Program	:	- Meningkatkan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
Manfaat Program	:	- Meningkatkan Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Paguyangan

5. Anggaran dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Anggaran dan Realisasi Pendapatan
Kecamatan Paguyangan T.A 2023

NO	INSTANSI	BELANJA		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
1	KECAMATAN PAGUYANGAN	3.067.401.000	2.990.126.000	97,48

Anggaran dan Realisasi Belanja
Kecamatan Paguyangan T.A 2023

NO	URUSAN	BELANJA		(%)
		ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	
KECAMATAN PAGUYANGAN				
1	Belanja Operasi	3.022.299.000	2.945.156.690	97,44
	- Belanja Pegawai	2.340.016.000	2.298.363.851	
	- Belanja Barang dan Jasa	682.283.000	646.792.839	
2	Belanja Modal	45.102.000	44.970.000	94,80
	- Pengadaan Mebel	13.102.000	13.070.000	
	- Pengadaan PC	32.000.000	31.900.000	
	JUMLAH	**3.067.401.000**	**2.990.126.690**	**97,48**

Anggaran dan Realisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Paguyangan T.A 2023				
NO	**PROGRAM/ KEGIATAN/ SUB KEGIATAN**	**ANGGARAN (Rp)**	**REALISASI (Rp)**	**(%)**
I	**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA**	2.823.059.000	2.748.272.990	97,35
	a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daearah	8.400.000	6.300.000	75
	1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2.100.000	2.100.000	100
	2. Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.800.000	750.000	41,66
	3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	1.800.000	1.050.000	58,33
	4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	600.000	450.000	75
	5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	900.000	900.000	100
	6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.200.000	1.050.000	87,50
	b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.344.416.000	2.301.813.851	98,18
	1. Penyediaan Gaji dan Tunjanhan ASN	2.340.016.000	2.298.363.851	98,22
	2. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	1.400.000	1.050.000	75
	3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.400.000	1.050.000	75
	4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	600.000	300.000	50
	5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	900.000	900.000	100
	c. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	1.500.000	450.000	38
	1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	300.000	0	0
	2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	600.000	450.000	75
	3. Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	600.000	0	0
	d. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.500.000	10.500.000	100

	1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	10.500.000	10.500.000	100
	2. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	9.418.800	9.418.800	100
	3. Penyediaan Perlalatan dan Perlengkapan kantor	24.926.800	24.878.400	99,80
	4. Penyediaan Perlatan Rumah Tangga	9.248.100	9.160.100	99,04
	5. Penyediaan Bahan logistic Kantor	44.000.000	44.000.000	100
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	10.557.200	9.987.200	94,60
	7. Fasilitasi Kunjungan Tamu	15.900.000	15.900.000	100
	8. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	69.140.000	54.110.000	78,26
	9. Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5.365.000	5.060.000	94,31
	e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**45.102.000**	**44.970.000**	**99,70**
	1. Pengadaan Mebel	13.102.000	13.070.000	99,75
	2. Pengadaaan Perlatan dan Mesin lainya	32.000.000	31.900.000	99,68
	f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	211.000.000	198.603.139	94,12
	1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat	5.300.000	5.300.000	100
	2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	25.100.000	19.622.207	78,176
	3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	9.600.000	9.600.000	100
	4. Penyediaan Jasa Pelayanan umum kantor	171.000.000	164.080.932	95,95
	g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.585.100	13.121.500	96,58
	1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	3.224.000	2.969.500	92,10
	2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioonal atau Lapangan	9.100.000	8.952.000	98,37
	3. Pemeliharaan Perlatan dan Mesin Lainya	1.261.100	1.200.000	95,15
II	**PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	185.490.000	168.678.204	90,93

	a. Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	35.410.000	34.654.000	97,86
	1. Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan dan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	23.050.000	22.294.000	96,72
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	12.360.000	12.360.000	100
	b. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	5.664.000	5.514.000	97,35
	1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	900.000	750.000	83,33
	2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	1.800.000	1.800.000	100
	3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2.964.000	2.964.000	100
	c. Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum	1.800.000	1.500.000	83,33
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1.800.000	1.500.000	83,33
	d. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.680.000	34.311.500	98,93
	1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	1.200.000	1.050.000	87,50
	2. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan nonperizinan	12.300.000	12.097.500	98,35
	3. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	21.180.000	21.164.000	99,92
III	**PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	33.360.000	33.312.000	99,85
	a. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	33.360.000	33.312.000	99,85
	1. Peningkatan partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	15.000.000	14.952.000	99,68
	2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	18.360.000	18.360.000	100

IV	**PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	43.680.000	43.500.000	99,58
	a. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	29.280.000	29.250.000	99,89
	1. Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi vertical di Wilayah Kecamatan	27.180.000	27.180.000	100
	2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	2.100.000	2.070.000	98,57
	b. Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah	14.400.000	14.250.000	98,95
	1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	14.400.000	14.250.000	98,95
V	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.	4.272.000	4.272.000	100
	a. Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	4.272.000	4.272.000	100
	1. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4.272.000	4.272.000	100
VI	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	85.476.000	84.790.200	99,19
	a. Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	85.476.000	84.790.200	99,19
	1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	9.896.000	9.894.400	99,98
	2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	9.792.000	9.792.000	100
	3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	5.000.000	4.962.000	99,24
	4. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	5.636.000	5.632.000	99,92
	5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	11.144.000	11.144.000	100
	6. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	9.108.000	9.108.000	100
	7. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	3.000.000	3.000.000	100
	8. Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	3.600.000	3.600.000	100

	9. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	7.200.000	7.200.000	100
	10. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	2.000.000	1.996.800	99,84
	11. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	3000.000	3000.000	100
	12. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	900.000	450.000	50
	13. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	2.400.000	2.244.000	93,50
	14. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	3.600.000	3.600.000	100
	15. Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	7.200.000	7.200.000	100
	16. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	2.000.000	1.967.000	98,35
JUMLAH		**3.067.401.000**	**2.990.126.690**	**97,48**

6. Penghargaan yang didapat di tahun 2023 (tingkat provinsi dan atau tingkat nasional)

-

-

B. PELAKSANAAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

NO	OPD PELAKSANA	URUSAN PEMERINTAHAN	KEBIJAKAN	URAIAN PROGRAM/ KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN	URAIAN INDIKATOR	TARGET INDIKATOR	REALISASI INDIKATOR	PERMASALAHAN DAN SOLUSI	TINJUT REKOMENDASI DPRD
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Kecamatan Paguyangan	**Urusan Kewilayahan**	**Kebijakan umum Program Peningkatan Pelayanan Umum**	**I. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN /KOTA**	**Survey Kepuasan Terhadap Pelayanan Perkantoran SKPD Kecamatan Paguyangan(%)**	96 %	83,51 %	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 83,51 dan mutu pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK	
				I.1. **Perencanaan , Penganggaran, dan evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**	**Perencanaan, Penganggaran, Pengendalian dan Evaluasi Kierja Perangkat Daerah**	**14 Dokumen**	**14 Dokumen** **8.400.000** **6.300.000** **(75 %)**		
				I.1.1 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencaan Perangkat Daerah	14 Dokumen	14 Dokumen 2.100.000 2.100.000 (100 %)		
				I.I.2. Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 1.800.000 750.000 (41,66 %)		

				I.I.3. Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 1.800.000 1.050.000 (58,33 %)		
				I.I.4. Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	5 Dokumen	5 Dokumen 600.000 450.000 (45)		
				I.1.5 Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	12 Laporan	12 Laporan 900.000 900.000 (100%)		
				I.I.6. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1 Laporan	1 laporan 1.200.000 1.050.000 (87,50)		
				I.2. Administrasi Keuangan Perangkatan Daerah	**Rasio Implementasi Pelaksanaan Administrasi Keuangan**	**10 Dokumen**	**10 Dokumen** **2.344.416.000** **2.301.813.851** **(98,18%)**		

				I.2.1 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang	22 orang 2.340.016.000 2.298.363.851 (98,22%)		
				I.2.2 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7 Dokumen	7 Dokumen 1.400.000\ 1.050.000 (75%)		
				I.2.3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 1.400.000\ 1.050.000 (75%)		
				I.2.4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12 Dokumen	5 Dokumen 600.000 300.000 (50 %)		
				I.2.5. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	12 Dokumen	4 Dokumen 900.000 900.000 (100 %)		
				I.3. **Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah**	**Persentase BMD-SKPD Dalam Kondisi Baik**	**93 %**	**93 %** **1.500.000** **450.000** **(38 %)**		

				I.3.1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	2 Dokumen 300.000 0 (0 %)		
				I.3.2. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dokumen	1 Dokumen 600.000 450.000 (75 %)		
				I.3.3. Penatausahaan Barang Milik Dearah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik	1 Laporan	1 Laporan 600.000 0 (0%)		
				I.4. **Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	Meningkatnya Kompetensi dan Kapasitas ASN	100 %	90 %		
				I.4.1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapanya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	32 Paket	32 Paket 10.500.000 10.500.000 (100 %)		
				I.5. Administrasi Umum Perangkat Daerah	**Tingkat Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**96 %**	**83,51 %**		
				I.5.1 Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket 9.418.800 9.418.800 (100%)		

				I.5.2 Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	10 Paket	10 Paket 24.926.800 24.878.400 (99,80%)		
				I.5.3 Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	3 Paket	3 Paket 9.248.100 9.160.100 (99,04 %)		
				I.5.4 Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	5 Paket	5 Paket 44.000.000 44.000.000 (100 %)		
				I.5.5 Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5 Paket 10.557.200 9.987.200 (94,60 %)		
				I.5.5. Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	65 Laporan	40 Laporan 15.900.000 15.900.000 (100 %)		
				I.5.6.Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100 Laporan	70 Laporan 69.140.000 54.110.000 (78,26 %)		

				I.5.7.Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	100 Dokumen	65 Dokumen 5.365.000 5.060.000 (94,31)		
				I.6. **Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**	**Jumlah Jenis Pengadaan BMD Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dibeli**	**6 Jenis**	**3 Jenis**		
				I.6.1. Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1 Unit	6 Unit 13.102.000 13.070.000 (99,75 %)		
				I.6.2. Pengadaaan Perlatan dan Mesin lainya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	5 Unit	2 Unit 32.000.000 31.900.000 (99,68 %)		
				I.7 Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	**Persentase Pelayanan Jasa Penunjang Terbayarkan**	**95 %**	**96 %**		
				I.7.1 Penyediaan jasa surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat	300 Laporan	200 Laporan 5.300.000 5.300.000 (100 %)		
				I.7.2 penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	12 Laporan 25.100.000 19.622.207 (78,17 %)		

				I.7.3. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	15 Laporan	5 Laporan 9.600.000 9.600.000 (100 %)		
				I.7.4.Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	8 Laporan	9 Laporan 171.000.000 164.080.932 (95,95 %)		
				I.8.Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	**Persentase BMD SKPD Dalam Kondisi Baik**	**95 %**	**90 %**		
				I.8.1 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	1 Unit 3.224.000 2.969.500 (92,10 %)		
				I.8.2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasioonal atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12 Unit	12 Unit 9.100.000 8.952.000 (98,37 %)		
				I.8.3 Pemeliharaan peralatan dan mesin lainya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	15 Unit	5 Unit 1.261.100 1.200.000 (95,15 %)		

	Kecamatan Paguyangan	**Urusan Kewilayahan**	**Kebijakan umum Program Peningkatan Pelayanan Umum**	**II. PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK**	**Hasil survey kepuasan pelayanan PATEN(%)**	100 %	83,51 %	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat setelah dikonversi mendapatkan nilai 83,51 dan mutu pelayanan termasuk Kategori B, dengan hasil Kinerja Unit Pelayanan adalah BAIK	
				II.1 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	**Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait**	**12 laporan**	**12 laporan** **35.410.000** **34.654.000** **(97,86 %)**		
				II.1.1.Koordinasi/sinergi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pemerintahan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal terkait	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	12 laporan	12 laporan 23.050.000 22.294.000 (96,72 %)		
				II.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	5 Dokumen	5 Dokumen 12.360.000 12.360.000 (100 %)		
				II.2.**Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan**	**Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di kecamatan.**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen** **5.664.000** **5.514.000** **(97,35 %)**		

				II.2.1. Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	1 Dokumen	1 Dokumen 900.000 750.000 (83,33 %)		
				II.2.2. Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	4 Dokumen	4 Dokumen 1.800.000 1.800.000 (100 %)		
				II.2.3. Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	2 Dokumen	2 Dokumen 2.964.000 2.964.000 (100 %)		
				II.3. **Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum**	**Jumlah Dokumen Koordinasi Pemeliharaan sarana dan prasarana umum**	**5 Laporan**	**5 Laporan** **1.800.000** **1.500.000** **(83,33 %)**		
				II.3.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	5 Dokumen	5 Dokumen 1.800.000 1.500.000 (83,33 %)		

				II.4.Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	**Jumlah Dokumen Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat**	**14 Dokumen**	**12 Dokumen** **34.680.000** **34.311.500** **(98,93 %)**		
				II.4.1. Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	31 Dokumen	32 Dokumen 1.200.000 1.050.000 (87,50%)		
				II.4.2 Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan non perizinan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Non Perizinan pada Urusan Pemerintahan	23 Laporan	15 Laporan 12.300.000 12.097.500 (98,35 %)		
				II.4.3. Pelaksanaan urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	20 Laporan	20 Laporan 21.180.000 21.164.000 (99,92 %)		
	Kecamatan Paguyangan	**Urusan Kewilayahan**	**Kebijakan umum Program Peningkatan Pelayanan Umum**	**III. PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN**	**Persentase desa yang melaksanakan administrasi serta pengelolaan keuangan desa yang tertib dan baik (%)**	**100%**	**87 %**	**Masih ada beberapa desa yang belum tertib administrasi terutama tentang laporan Pertanggungjawaban**	
				III.1. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	**Jumlah Dokumen usulan prioritas pembangunan tingkat kecamatan**	**2 Dokumen**	**8 Dokumen** **33.360.000** **33.312.000** **(99,85 %)**		

				III.1.1.Peningkatan partisipasi masyarakat dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	25 Lembaga Kemasyarakatan	5 Lembaga Kemasyarakatan 15.000.000 14.952.000 (99,68 %)		
				III.1.2. Peningkatan Efektifitas Kegiatan pemberdayaan Masyarakat di wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	78 Laporan	45 Laporan 18.360.000 18.360.000 (100 %)		
	Kecamatan Paguyangan	**Urusan Kewilayahan**	**Kebijakan umum Program Peningkatan Pelayanan Umum**	**IV. PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM**	**Persentase Pencegahan Pelanggaran Perda Perbub Tertangani(%)**	**100 %**	**92 %**	**Ketentraman dan ketertiban di Wilayah kecamatan aman dan kondusif**	
				IV.1. Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentrama dan Ketertiban Umum	**Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum**	**100 %**	**95 %** **29.280.000** **29.250.000** **(99,89 %)**		
				IV.1.1 Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	55 laporan	12 laporan 27.180.000 27.180.000 (100 %)		

				IV.1.2. Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	10 Laporan	12 laporan 2.100.000 2.070.000 (98,57 %)		
				IV.2. **Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan daerah dan Peraturan Kepala Daerah**	**Dokumen pelaksanaan Koordinasi Penerapan dan Penegakan Perda dan Perkada**	**5 Dokumen**	**5 Dokumen** **14.400.000** **14.250.000** **(98,95 %)**		
				IV.2.1. Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	20 Laporan	15 Laporan 14.400.000 14.250.000 (98,95 %)		
				V. **PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM.**	**Persentase Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum (%)**	**95 %**	**96 %**	**Penyelenggaraan Program Urusan Pemerintahan Umum berjalan optimal**	
				V.1. **Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**Penyelenggaraan Uusan Sesuai Penugasan Kepala Daerah**	**10 Kegiatan**	**12 Kegiatan** **4.272.000** **4.272.000** **(100 %)**		

				V.1.2. Pengembangan Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	Jumlah Lembaga Masyarakat yang Dikembangkan dalam Kehidupan Demokrasi berdasarkan Pancasila	4 Lembaga Masyarakat	4 Lembaga Masyarakat 4.272.000 4.272.000 (100 %)		
				VI. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	**Persentase Desa yang Melaksanakan Administrasi serta Pengelolaan Keuangan Desa yang Tertib dan Baik(%)**	**100%**	**87 %**	**Program sudah berjalan optimal dan tidak ditemukan masalah walaupun belum memenuhi target indikator**	
				V.1.Fasilitasi Rekomendasi dan koordinasi pembinaan dan pengawasan pemerintahan desa	**Dokumen pembinaan dan pengawasan desa**	**30 Dokumen**	**24 Dokumen** **85.476.000** **84.790.200** **(99,19 %)**		
				V.1.1. Fasilitasi Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Penyusunan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa	12 Dokumen	12 Dokumen 9.896.000 9.894.400 (99,98 %)		
				V.I.2. Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	12 Dokumen	12 Dokumen 9.792.000 9.792.000 (100 %)		
				V.1.3. Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Cakupan Desa yang Tertib Penatausahaan Aset Desa	100 %	90 % 5.000.000 4.962.000 (99,24 %)		

				V.1.4. Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Fasilitasi dalam rangka Penerapan dan Penegakan Peraturan Perundang- Undangan	2 Laporan	2 Laporan 5.636.000 5.632.000 (99,92 %)		
				V.1.5. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	12 Dokumen	12 Dokumen 11.144.000 11.144.000 (100 %)		
				V.1.6. Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	24 Dokumen	3 Dokumen 9.108.000 9.108.000 (100 %)		
				V.1.7. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa	12 Dokumen	10 Dokumen 3.000.000 3.000.000 (100%)		
				V.1.8.Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	Jumlah Dokumen Rekomendasi Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa	2 Dokumen	2 Dokumen 3.600.000 3.600.000 (100 %)		
				V.1.9. Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	8 Dokumen	8 Dokumen 7.200.000 7.200.000 (100%)		

				V.1.10. Fasilitasi Penetapan Lokasi Pembangunan Kawasan Pedesaan	Jumlah Dokumen Fasilitasi Lokasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	5 Dokumen	5 Dokumen 2.000.000 1.996.800 (99,84 %)		
				V.1.11. Fasilitasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas, Fungsi, dan Kewajiban Lembaga Kemasyarakatan	91 Dokumen	12 Dokumen 3.000.000 3.000.000 (100 %)		
				V.1.12. Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Perencanaan Pembangunan Partisipatif	12 Dokumen	12 Dokumen 900.000 450.000 (50 %)		
				V.1.13. Fasilitasi Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Kerja Sama Antar Desa dan Kerja Sama Desa dengan Pihak Ketiga	12 Dokumen	12 Dokumen 2.400.000 2.244.000 (93,50 %)		
				V.1.14. Fasilitasi Penyusunan Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Program dan Pelaksanaan Pemberdayaan Masyarakat Desa	60 Dokumen	36 Dokumen 3.600.000 3.600.000 (100 %)		

				V.1.15. Koordinasi Pemdampingan Desa di Wilayahnya	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pendampingan Desa di Wilayahnya	25 Laporan	15 Laporan 7.200.000 7.200.000 (100 %)		
				V.1.16. Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Pembangunan Kawasan Perdesaan di Wilayah Kecamatan	30 Laporan	14 Laporan 2.000.000 1.967.000 (98,35 %)		

Paguyagan, 09 Januari 2024

CAMAT PAGUYANGAN

Salamun,S.IP

Pembina

NIP. 19660928 199003 1 007

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
Jalan Raya Paguyangan No. 64 Telepon 432196
Laman: paguyangan.brebeskab.go.id, Pos-el: kec.paguyangan@gmail.com

Paguyangan, 11 Januari 2024

Yth. Setda Kab. Brebes
Cq. Bagian Tata Pemerintahan
di
B R E B E S

SURAT PENGANTAR
900.1/22/I/2024

No	Jenis surat yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	IKK LPPD Kecamatan Paguyangan Tahun 2023.	1 (satu) berkas.	Dikirim dengan hormat, untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Camat Paguyangan

Salamun, S.IP
Pembina – IV/a
NIP. 196609281990031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN
Jalan Raya Paguyangan No. 64 Telepon 432196
Laman: paguyangan.brebeskab.go.id, Pos-el: kec.paguyangan@gmail.com

SURAT KETERANGAN
NOMOR 900.1/22/I/2024

Dengan ini kami menerangkan bahwa Kecamatan Paguyangan Tidak Memiliki Akses Publik terhadap informasi Keuangan Daerah (Public Access to Fiscal Information) berupa Website.

Demikian untuk menjadi periksa dan guna seperlunya.

Camat Paguyangan

Salamun, S.IP
Pembina – IV/a
NIP. 196609281990031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

LAMPIRAN SURAT
Nomor :
Hal : Data Kelengkapan LPPD

Transparansi dan Partisipasi Publik

No	IKK	RUMUS	CapaianKinerja	Sumber Data
1.	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan (Information on resources avaible to frontline service delivery units)	Belanja anggaran untuk unit pelayanan dapat diakses di website Pemda ----------x 100% Realiasasi belanja untuk unit pelayanan dapat diakses di website pemda	---------- x 100%	**TIDAK ADA**
Keterangan : • Unit pelayanan public adalah unit kerja/kantor pelayanan pada instansi pemerintah, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima pelayanan. • Data yang diminta adalah jumlah unit pelayanan yang mempublikasikan informasi anggaran dan realisasi belanja pada tahun sebelumnya. • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait.				
2.	Akses public terhadap informasi keuangan daerah (Public access to fiscal information)	Jumlah dokumen yang dipublikasikan di website pemda ..... x 100% Total jumlah dokumen yang telah dirinci	---------- x 100%	**TIDAK ADA**
Keterangan : • Daftar dokumen yang diminta : Ringkasan RKA SKPD, Ringkasan RKA SKPD, Raperda APBD, Raperda Perubahan APBD, Perda APBD, Perda Perubahan APBD, Ringkasan DPA SKPD, Ringkasan DPA SKPD, LRA Seluruh SKPD, LRA PPKD, LKPD yang sudah di Audit, Opini atas LKPD • Dibuktikan dengan dokumen pendukung terkait				

Camat Paguyangan

Salamun, S.IP
Pembina – IV/a
NIP. 196609281990031007

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN